

ABSTRAK

UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA UD. KANDE JAYA DENGAN CV. PERMATA KONSTRUKSI DI KOTA BENGKULU

Hubungan kreditor dan debitor pada perjanjian pemborongan merupakan hubungan hukum keperdataan yang mempunyai posisi dan kedudukan yang sama yaitu adanya hak dan kewajiban diantara para pihak sesuai peraturan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pelaksanaan perjanjian adanya suatu peristiwa hukum yang dimungkinkan akan timbulnya akibat hukum, apabila dari pelaksanaannya salah satu pihak yang seharusnya berprestasi tetapi tidak memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian maka pihak tersebut dianggap lalai atau wanprestasi.

Berdasarkan hal tersebutlah, penulis mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum akta di bawah tangan sertamengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dengan memfokuskan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *yuridis empiris* bersifat *deskriptif analitis* dengan melakukan wawancara dan penelitian kepustakaan terkait dengan masalah yang diteliti.

Pada pelaksanaan perjanjian adanya suatu kesepakatan yang dibuatkan dalam bentuk kontrak baik itu dalam bentuk tertulis atau lisan, apabila ditungkan dalam bentuk tulisan maka dapat berupa akta di bawah tangan atau akta notaris, yang mana pada akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak karena tidak memiliki bentuk formal melainkan bebas sesuai dengan keinginan para pihak, sedangkan kekurangan dan kelemahan dari akta di bawah tangan yaitu ketiadaan saksi dalam pembuatan akta di bawah tangan yang akan menyulitkan dalam pembuktian jika dibawa keranah hukum litigasi, karena kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan, dan mempunyai keuntungan dari segi waktu, biaya dan hasil berupa win-win solution. Lain hal nya dengan akta notaris karena bentuk dan dibuatkan dihadapan pejabat umum yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna.

Kata Kunci: Perjanjian pemborongan, wanprestasi, akta di bawah tangan, penyelesaian sengketa.

ABSTRACT

DEFAULT RESOLUTION EFFORTS IN THE CONSTRUCTION CONTRACT BETWEEN UD.KANDE JAYA AND CV. PERMATA KONSTRUKSI IN BENGKULU CITY

The relation between creditor and debtor in a construction contract is a civil law relationship with equal position by the presence of rights and obligations between the parties in accordance with Law No.13 of 2003 on Employment. In an agreement implementation, there is a legal event with possible legal effect if one of the parties who should perform well but he does not perform as determined in the contract. Therefore, the party is considered to be ignorant of default.

On the basis of the aforementioned, the writer studied and analyzed the legal power of individual deed, and studied and analyzed the default dispute resolution by focusing this research using the research approach of empirical-judicial and having the character of analytical-descriptive through interview and library research related to the problems examined.

In the implementation of an agreement, there is an agreement made into a contract in the form of both written and oral. When it is stated in the form of writing, it can be individual or notary deed in which it has the power of proof as long as there is not denial from one of the parties since it does not have formal form and it is in a free form in accordance with the parties' willingness. On the other hand, the weaknesses of individual deed are the absence of witness in the making of individual deed that will make it difficult to prove when it is brought to the domain of litigation because the truth of individual deed must be proven before the court, and having many advantages in terms of time, cost and results in the form of the win-win solution. It is different from notary deed in terms of its form and it is made before the authorized public official so that it has perfect power.

Keywords: Construction contract, Default, Individual Deed, settlement of disputes.